

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Deskripsi Teori

##### 1. Teori Legitimasi

Teori legitimasi dikemukakan pertama kali oleh *Dowling dan Pfeffer*, legitimasi adalah hal yang penting bagi organisasi, batasan-batasan yang ditekankan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial, dan reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan.<sup>1</sup> Teori legitimasi didasarkan pada pengertian kontrak sosial yang diimplikasikan antara institusi sosial dan masyarakat. Teori legitimasi secara eksplisit mengakui bahwa bisnis dibatasi oleh kontrak sosial yang menyebutkan bahwa perusahaan sepakat untuk menunjukkan berbagai aktivitas sosial perusahaan yang pada akhirnya akan menjamin kelangsungan hidup perusahaan.

*Legitimation Theory* menjelaskan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial dilakukan perusahaan dalam upayanya untuk mendapatkan legitimasi dari komunitas dimana perusahaan itu berada dan memaksimalkan kekuatan keuangannya dalam jangka panjang. *Legitimation Theory* adalah “kontrak sosial” yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi.<sup>2</sup> Teori legitimasi mendorong perusahaan untuk melakukan tanggungjawab terhadap lingkungan agar terlihat legitimate dimata masyarakat. Perusahaan akan cenderung bertindak sesuai keinginan masyarakat yaitu mampu bertanggung jawab terhadap lingkungan. Masalah lingkungan yang disebabkan oleh operasi perusahaan tidak hanya terkait lingkungan sekitar perusahaan, namun sudah berkembang pada pemanasan global yang disebabkan oleh gas emisi yang dihasilkan perusahaan.

---

<sup>1</sup> J. Dowling dan J. Pfeffer, “Organizational Legitimacy: Social Values and Organizational Behavior”, *Pacific Sociological Review* 18, no. 3 (2018): 125.

<sup>2</sup> Imam Ghozali dan Anis Chariri, *Teori Akuntansi* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2017), 65.

Perusahaan menggunakan laporan tahunan mereka untuk menggambarkan kesan tanggung jawab lingkungan, sehingga mereka diterima oleh masyarakat. Dengan adanya penerimaan dari masyarakat tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan. Hal tersebut dapat mendorong atau membantu investor dalam melakukan pengambilan keputusan investasi.<sup>3</sup>

Ghozali dan Chariri menjelaskan bahwa teori legitimasi sangat bermanfaat dalam menganalisis perilaku organisasi, karena teori legitimasi adalah hal yang paling penting bagi organisasi. Batasan-batasan yang ditekankan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial serta reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan. Teori ini dilandasi oleh kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi. Legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat.

Sehingga teori legitimasi merupakan teori yang paling sering digunakan terutama ketika berkaitan dengan wilayah sosial dan akuntansi lingkungan. Meskipun masih terdapat pesimisme yang kuat yang dikemukakan oleh banyak peneliti, teori ini telah dapat menawarkan sudut pandang yang nyata mengenai pengakuan sebuah perusahaan secara sukarela oleh masyarakat.<sup>4</sup>

Teori legitimasi memberikan pandangan bahwa organisasi secara terus menerus berusaha untuk menciptakan keselarasan antara nilai-nilai sosial yang melekat pada kegiatan suatu organisasi dengan norma-norma perilaku yang ada dalam sistem sosial masyarakat dimana organisasi adalah bagian dari sistem tersebut. Legitimasi dapat dianggap sebagai menyamakan persepsi

---

<sup>3</sup> Rida Gabriella Handayani Tamba, "Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan", (*Skripsi*, Universitas Diponegoro Semarang, 2018), 19.

<sup>4</sup> Ghozali dan Chariri, *Teori Akuntansi*, 71.

atau asumsi bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas adalah merupakan tindakan yang diinginkan, pantas maupun sesuai dengan sistem norma, nilai, kepercayaan dan definisi yang dikembangkan secara sosial.<sup>5</sup>

Gray, et al juga mendefinisikan bahwa legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat (*society*), pemerintah individu dan kelompok masyarakat. Untuk itu, sebagai suatu sistem yang mengutamakan keberpihakan atau kepentingan masyarakat, operasional perusahaan harus mempertimbangkan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan batasan, norma-norma dan harapan masyarakat.<sup>6</sup>

Teori legitimasi didasari oleh kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan tersebut beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi. Penjelasan tentang konsep kontrak sosial sebagai berikut: “Semua institusi sosial tidak terkecuali perusahaan beroperasi di masyarakat melalui kontrak sosial baik eksplisit maupun implisit dimana kelangsungan hidup dan pertumbuhannya didasarkan pada hasil akhir yang secara sosial dapat diberikan kepada masyarakat luas dan distribusi manfaat ekonomi, sosial, atau politik kepada kelompok sesuai dengan power yang dimiliki.”<sup>7</sup>

Berdasarkan teori legitimasi, organisasi akan terus berusaha untuk memastikan bahwa mereka dianggap beroperasi dalam batas-batas dan normanorma dalam masyarakat. Mereka berusaha untuk memastikan bahwa

---

<sup>5</sup> Mark C. Suchman, “Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches Author(s)”, *Source: The Academy of Management Review* 20, no. 3 (1995).

<sup>6</sup> Gray, dkk, *Accounting and Accountability* (Europe: Prentice Hall, 2016),71.

<sup>7</sup> A.D. Shocker dan S.P. Sethi, *An Approach to Incorporating Social Preferences in Developing Corporate Action Strategies* (Los Angeles: Melville Publishing Company, 2014), 43.

pemangku kepentingan menganggap aktivitas mereka sebagai legitimasi.<sup>8</sup>

Pengungkapan lingkungan merupakan salah satu cara bagi organisasi untuk memperoleh legitimasi ini.<sup>9</sup> Selain itu teori legitimasi menjelaskan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial dilakukan perusahaan dalam upayanya untuk mendapatkan legitimasi dari komunitas dimana perusahaan itu berada dan memaksimalkan kekuatan keuangannya dalam jangka panjang.

Ketika terjadi ketidaksesuaian apa yang diharapkan antara aktivitas perusahaan dan nilai-nilai yang ada pada masyarakat, maka akan muncul *legitimacy gap*. Hadirnya *legitimacy gap* akan menurunkan citra baik dari perusahaan. Menurut Wartick dan Mahon dalam Ghozali dan Chariri *legitimacy gap* dapat terjadi karena tiga alasan, yakni:

- a. Adanya perubahan dalam kinerja perusahaan tetapi harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan tidak berubah.
- b. Kinerja perusahaan tidak berubah tetapi harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan telah berubah.
- c. Kinerja perusahaan dan harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan berubah ke arah yang berbeda, atau ke arah yang sama tetapi waktunya berbeda.

Upaya untuk menghindari adanya *legitimacy gap* perusahaan berusaha lewat komunikasi atau interkasi sosial dengan masyarakat mengenai praktik-praktik yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada. Selain itu, upaya untuk mendapatkan legalitas, perusahaan harus melakukan pengungkapan tanggung jawab sosialnya agar perusahaan mendapatkan kepercayaan sehingga perusahaan dapat beroperasi secara keberlanjutan. Teori legitimasi mendorong perusahaan untuk melakukan tanggungjawab

---

<sup>8</sup> C. Deegan, *Financial Accounting Theory* (Sydney: McGraw-Hill Book Company, 2014), 71.

<sup>9</sup> Sylvie Berthelot dan Anne-Marie Robert, "Climate Change Disclosure: An Examination of Canadian Oil and Gas Firms", *Issues in Social and Environmental Accounting* 1, no. 5 (2018): 109.

terhadap lingkungan agar terlihat *legitimate* di mata masyarakat. Perusahaan akan cenderung bertindak sesuai keinginan masyarakat yaitu mampu bertanggung jawab terhadap lingkungan. Masalah lingkungan yang disebabkan oleh operasi perusahaan tidak hanya terkait lingkungan sekitar perusahaan, namun sudah berkembang pada pemanasan global yang disebabkan oleh gas emisi yang dihasilkan perusahaan.<sup>10</sup>

Teori legitimasi berfokus pada hubungan antara perusahaan dan masyarakat melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Pengungkapan berperan dalam menjembatani perusahaan dengan kelompok masyarakat.<sup>11</sup> Legitimasi adalah persepsi umum atau anggapan bahwa tindakan suatu entitas yang diinginkan, tepat, kepercayaan dan definisi.<sup>12</sup> Perusahaan terdorong untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat karena ingin meyakinkan bahwa aktifitas operasi perusahaan telah sesuai dengan norma dan batasan-batasan berdasarkan ketentuan yang berlaku.<sup>13</sup> Legitimasi itu sendiri akan diperoleh perusahaan jika antara masyarakat dan perusahaan terdapat persamaan hasil yang diharapkan, sehingga mengurangi risiko jangka panjang dari tuntutan masyarakat.<sup>14</sup>

## 2. Teori Stakeholder (*Stakeholders Theory*)

*Stakeholder* merupakan individu, kelompok manusia, komunitas atau masyarakat baik sebagian maupun seluruhnya yang memiliki kepentingan dan hubungan dengan perusahaan.<sup>15</sup> Teori yang

---

<sup>10</sup> Steven Wartick dan John F Mahon, "Toward a Substantive Definition of the Corporate Issue Construct: A Review and Synthesis of the Literature", *Business & Society* 33, no. 3 (2019): 295.

<sup>11</sup> Gray, dkk, *Accounting and Accountability*, 75.

<sup>12</sup> A.S. Burlea dan I. Popa, "Legitimacy Theory", *Encyclopedia of Corporate Social Responsibility* 2, no. 3 (2018): 1580.

<sup>13</sup> Deegan, *Financial Accounting Theory*, 78.

<sup>14</sup> C. Deegan, dkk, "An Examination of The Corporate Social and Environmental Disclosures of BHP From 1983-1997: A Test of Legitimacy Theory", *Accounting, Auditing and Accountability Journal* 15, no. 3 (2019): 314.

<sup>15</sup> Ghazali dan Chariri, *Teori Akuntansi*, 75.

dikembangkan oleh Edward Freeman ini menekankan bahwasannya perusahaan harus memberikan manfaat terhadap *stakeholder* (pemerintah, *employee*, *shareholder*, masyarakat, *customer*, *supplier*, dan pihak lainnya) dengan cara memberikan informasi - informasi terkait kegiatan perusahaan.<sup>16</sup> Informasi tersebut dapat berupa aktivitas perusahaan yang secara langsung mempengaruhi mereka, misalnya: polusi, sponsorship, inisiatif pengamanan.<sup>17</sup>

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Gray dkk dalam Ghazali dan Chairiri yang menyatakan:

“Kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan stakeholder dan dukungan tersebut harus dicari sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Makin powerful stakeholder, makin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi. Pengungkapan sosial dianggap sebagai bagian dari dialog antara perusahaan dengan stakeholder-nya”.<sup>18</sup>

Tujuan utama dari teori *stakeholders* yakni membantu manajemen korporasi agar mengerti mengenai lingkungan stakeholder dan dapat mengelolanya secara efektif. Namun, tujuan *stakeholders* secara luas dapat difahami sebagai penolong manajer korporasi untuk meningkatkan nilai karena aktivitasnya, dan meminimal kerugian bagi stakeholder.<sup>19</sup>

Berdasarkan protokol kyoto perusahaan dapat mengungkapkan mengenai *Carbon dioxide* (CO<sub>2</sub>), *Methane* (CH<sub>4</sub>), *Nitrous Oxide* (N<sub>2</sub>O), *Hydrofluorocarbons* (HFCS), *Perfluorocarbons* (PFCS) dan *Sulfur hexafluoride* (SF<sub>6</sub>) dalam laporan GRK nya setiap tahun. *Carbon dioxide* (CO<sub>2</sub>) merupakan jenis gas yang paling banyak menyumbang emisi daripada gas lainnya, hal itu tidak terlepas dari adanya aktivitas

---

<sup>16</sup> Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan dan Implementasi* (Malang: In-Transit Publishing, 2016), 80.

<sup>17</sup> Ihyaul Ulum, *Intectual Capital: Model Pengukuran, Framework Pengungkapan & Kinerja Organisasi* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2017), 35.

<sup>18</sup> Ghazali dan Chariri, *Teori Akuntansi*, 84.

<sup>19</sup> Ulum, 36.

perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan diwajibkan mengungkapkan emisi karbon (*carbon emission disclosure*) kepada *stakeholder* mengingat keadaan tersebut juga berimbas terhadap lingkungan *stakeholder*.

Disamping itu pengungkapan emisi karbon (*carbon emission disclosure*) merupakan suatu bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan terkhusus *stakeholder*. Jika masalah emisi karbon dibiarkan, maka yang terjadi salah satunya yakni perlahan lingkungan tidak dapat lagi mendukung aktivitas perusahaan lagi. *Stakeholder* adalah orang atau kelompok yang memiliki, mengklaim, kepemilikan hak atau kepentingan dalam suatu perusahaan dan kegiatannya dilakukan pada masa lalu, sekarang dan masa yang akan datang. *Stakeholder* terdiri dari pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis dan pihak lainnya. Pengaruh *stakeholder* perlu dibedakan dengan melihat berbagai faktor terlebih dahulu. *Stakeholder* digolongkan sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. *Primary Stakeholder* merupakan seseorang atau kelompok yang tanpanya perusahaan tidak dapat mempertahankan keberlangsungan hidup usahanya (*going concern*). *Stakeholder primer* terdiri dari pemegang saham investor, karyawan, pelanggan dan pemasok, bersama dengan didefinisikan sebagai *stakeholder public* yaitu, pemerintah dan komunitas. Ada tingkat saling ketergantungan yang tinggi antara perusahaan dan kelompok pemangku kepentingan utamanya.
- b. *Secondary stakeholder* adalah mereka yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan tetapi mereka tidak berhubungan dengan transaksi yang terjadi di perusahaan dan tidak esensial kelangsungan hidupnya seperti media masa dan masyarakat luas.

---

<sup>20</sup> Max E. Clarkson, "A Stakeholder Framework and Evaluating for Analyzing Evaluating Corporate Social Performance", *Academy of Management Review* 20, no. 1 (2018): 95.

Teori stakeholder digunakan untuk menjelaskan variabel ukuran dewan komisaris. Peran stakeholder dalam aktivitas perusahaan adalah dengan melaksanakan fungsi pengawasan hingga memberikan tekanan terhadap pihak manajemen perusahaan. Dewan komisaris dalam perusahaan memiliki tugas untuk memberikan pengawasan terkait kinerja manajemen dalam perusahaan, dengan ini maka perusahaan memiliki tekanan yang lebih tinggi untuk melakukan pengungkapan mengenai emisi karbon.

Perusahaan dengan ukuran dewan komisaris yang tinggi cenderung akan melakukan pengungkapan emisi karbon yang lebih baik daripada perusahaan dengan ukuran dewan komisaris yang rendah. Dewan komisaris akan memastikan adanya tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat serta lingkungan sekitarnya, sehingga eksistensi perusahaan dapat terjaga dan mampu membangun citra perusahaan yang ramah lingkungan di mata para stakeholdernya.<sup>21</sup>

### 3. *Carbon Emission*

*Accounting Carbon* merupakan bentuk implikasi dari adanya carbon trade yang merupakan bentuk dari adanya protokol kyoto. Istilah Protokol kyoto dan UNFCCC memiliki hubungan yang erat, dimana Protokol Kyoto merupakan suatu bentuk penjabaran yang lebih spesifik dan rinci mengenai UNFCCC. Negara yang telah meratifikasi Protokol Kyoto secara otomatis akan terikat secara hukum mengenai kebijakan di dalamnya. Pada 18 November 2004, Protokol Kyoto menjadi kuat setelah 55 anggota meratifikasi emisinya termasuk negara-negara industri.<sup>22</sup>

Negara-negara yang telah meratifikasi konvensi ini pada akhirnya dikelompokkan menjadi Negara *Annex I*

---

<sup>21</sup> Clarkson, "A Stakeholder Framework and Evaluating for Analyzing Evaluating Corporate Social Performance", 96.

<sup>22</sup> [https://unfccc.int/sites/default/files/sekilas\\_tentang\\_perubahan\\_iklim.pdf](https://unfccc.int/sites/default/files/sekilas_tentang_perubahan_iklim.pdf) , diakses pada 16 Oktober 2019



dan Negara *Non Annex I*. Negara Annex I merupakan negara dengan penyumbang GRK sejak revolusi industri 1985an. Sedangkan negara non Annex yakni kelompok negara dengan kontribusi GRK lebih sedikit atau bisa disebut dengan negara ekonomi yang sedang berkembang, Indonesia termasuk dalam katagori ini.

Melalui Protokol Kyoto, negara- negara yang termasuk dalam kelompok Annex I memiliki kewajiban secara terikat untuk mengurangi emisi GRK agar tidak merugikan pihak lain, khususnya negara berkembang. Hal itu tidak lepas dari citra Negara Annex I yang merupakan negara Industri. Tentu saja negara dalam kelompok tersebut turut menyumbang GRK secara aktif dalam penggunaan bahan bakar fosil untuk kegiatannya. Pada Protokol Kyoto, Negara Annex I harus mencantumkan GRK yang diatur di Protokol diantaranya: *Carbon dioxide* (CO<sub>2</sub>), *Methane* (CH<sub>4</sub>), *Nitrous Oxide* (N<sub>2</sub>O), *Hydrofluorocarbons* (HFCs), *Perfluorocarbons* (PFCs) dan *Sulfur hexafluoride* (SF<sub>6</sub>) beserta sumber emisinya seperti halnya energi, proses industri, pertanian dan pengolahan limbah dalam laporan GRK nya setiap tahun.<sup>23</sup>

GRK (*greenhouse gases*) atau gas-gas penyusun udara ini memiliki komposisi tidak kurang dari 30 jenis gas, namun yang utama adalah oksigen (O<sub>2</sub>, 20%), *carbon dioksida* (CO<sub>2</sub>, 0,03%), *Nitrogen* (N<sub>2</sub>, 79%), serta gas-gas mulia. Sebenarnya gas-gas tersebut telah terbentuk sejak awal terbentuknya bumi kecuali gas nitrogen<sup>24</sup>. Namun komposisi gas-gas tersebut dapat berubah seiring kegiatan manusia, misalnya saja penggunaan bahan bakar fosil yang berlebihan pada akhirnya dapat meningkatkan karbon dioksida (CO<sub>2</sub>) dan maraknya alih fungsi lahan yang akan berimbas pada berkurangnya kadar oksigen (O<sub>2</sub>) di bumi ini. Tentu saja hal tersebut rentan terjadi

---

<sup>23</sup> <https://walhibali.org/lembar-informasi-2/> , diakses pada 16 Oktober 2019.

<sup>24</sup> Mukhlis Akhadi, *Isu Lingkungan Hidup: Mewaspada Dampak Kemajuan Teknologi dan Polusi Lingkungan Global yang Mengancam Kehidupan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 236

fenomena perubahan iklim. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam laporan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan Monitoring Pelaporan Verifikasi (MPV) 2018 menyatakan bahwasannya terjadi peningkatan emisi GRK di tahun 2017 sebesar 124.879 Gg CO<sub>2</sub>e dibanding emisi GRK di tahun 2000.

#### 4. Emisi Karbon

Berdasarkan teori stakeholder (*stakeholders theory*) bahwasannya perusahaan dituntut untuk terbuka mengenai informasi yang dimilikinya. Informasi yang telah diungkapkan oleh perusahaan dikelompokkan menjadi dua jenis yakni bersifat *mandatory disclosure* dan *voluntary disclosure*.<sup>25</sup> Di Indonesia, pengungkapan mengenai carbon emission disclosure masih bersifat *voluntary*, dimana pengungkapannya dilakukan secara sukarela mengingat masih belum ada peraturan atau perundang-undangan yang mewajibkan pengungkapan tersebut. Kondisi ini tidak terlepas dari adanya protokol kyoto yang mengelompokkan Indonesia sebagai negara *non-annex I*, artinya jumlah emisi karbon yang dihasilkan perusahaan di Indonesia masih tergolong lebih sedikit dibandingkan dengan negara-negara Industri (*Annex I*).

Pengungkapan mengenai carbon emission ini dapat membantu investor global dalam mengambil keputusan terkait usaha perusahaan dalam mengurangi emisi karbonnya dan upaya melindungi iklim dunia. Secara umum perusahaan akan mengungkapkan *voluntary disclosure*-nya jika akan meningkatkan nilai perusahaan<sup>26</sup>. Jika pengungkapan berisiko menurunkan reputasi atau nilai perusahaan maka perusahaan akan menahan informasi tersebut. Situasi tersebut tidak lepas dari *signalling theory*.

---

<sup>25</sup> Ghozali dan Chariri, *Teori Akuntansi*, 393.

<sup>26</sup> George Emmanuel Iatridis, "Environmental Disclosure Quality: Evidence on Environmental Performance, Corporate Governance and Value Relevance", *Emerging Markets Review* 14, no. 1 (2013): 61.

## 5. *Growth*

*Growth* adalah sebuah rasio yang menunjukkan kemampuan dari suatu perusahaan dalam melindungi posisi ekonominya pada saat pertumbuhan perekonomian dan berbagai macam sektor usaha yang dimilikinya. *Growth* dapat dilihat dari berbagai macam bagian, antara lain penjualan, aset, laba, dan sebagainya. *Growth* pada penelitian ini dihitung dengan menggunakan sales growth (pertumbuhan penjualan). Dijelaskan oleh Kasmir bahwa sales *growth* menggambarkan sejauh mana perusahaan mampu meningkatkan penjualannya terhadap total penjualan keseluruhan pada suatu periode. Sales *growth* perusahaan yang terus meningkat setiap tahun menunjukkan bahwapertumbuhan perusahaan terus membaik. *Growth* dihitung dengan menggunakan selisih nilai penjualan pada tahun  $x$  dan penjualan tahun  $x-1$  dibagi dengan penjualan tahun  $x-1$ .<sup>27</sup>

## 6. *Profitability*

*Profitability* ialah rasio untuk menilai efektivitas manajemen yang dapat dilihat dari besarnya keuntungan yang didapatkan terkait dengan penjualan atau investasi. *Profitability* juga digunakan untuk melihat kinerja perusahaan, apabila *profitability* tinggi maka perusahaan berkinerja baik. *Profitability* dalam penelitian diukur memakai *Return on Asset (ROA)*, yaitu keuntungan (laba) perusahaan dibanding total aset.<sup>28</sup>

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba atau keuntungan dalam suatu periode tertentu. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (profit) yang akan menjadi dasar pembagian deviden perusahaan. Profitabilitas juga dapat memberikan ukuran tingkat aktivitas manajemen perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan

---

<sup>27</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 64.

<sup>28</sup> I. Fahmi, *Analisis Laporan Keuangan* (Bandung: Alfabeta, 2015), 94.

investasi.<sup>29</sup> Profitabilitas juga menggambarkan kemampuan badan usaha untuk menghasilkan laba dengan menggunakan seluruh modal yang dimiliki. Selain itu, profitabilitas memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini dapat dilihat melalui laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investigasi.

## 7. *Enviromental Performance*

*Environmental performance* yaitu suatu kemampuan perusahaan dalam membuat lingkungan hijau dan bersih di sekitar tempat mereka beroperasi.<sup>30</sup> Perusahaan dengan *environmental performance* baik akan membuat pengungkapan terkait lingkungan dalam mengkomunikasikan kinerjanya, sehingga nantinya akan memperoleh leg itimasi dari masyarakat. *Environmental performance* juga dapat memberikan informasi bagaimana kepedulian serta tanggung jawab sebuah perusahaan pada lingkungan sekitarnya sebagai akibat dari kegiatan operasional mereka.

Kinerja lingkungan (*Enviromental performance*) yang baik merupakan salah satu bentuk kepedulian perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang baik. Dalam menjalankan aktivitasnya perusahaan akan memberikan efek terhadap lingkungannya, pencemaran contohnya. Hal itu yang melatarbelakangi adanya Program Penilaian Peringkat Kinerja Lingkungan (PROPER) yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan hidup untuk menilai ketaatan perusahaan dalam melakukan kinerjanya.

Program yang telah diluncurkan sejak tahun 2002 ini mempunyai harapan agar terjadi peningkatan kinerja perusahaan dalam memberikan transparansi informasi mengenai aktivitas pengelolaan lingkungannya. Oleh

---

<sup>29</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, 67.

<sup>30</sup> Ischazilatul Amaliyah dan Badingatus Solikhah, "Pengaruh Kinerja Lingkungan Dan Karakteristik Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon", *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech)* 2, no. 2 (2019): 131.

sebab itu, maka hasil dari pemeringkatan PROPER ini akan diumumkan ke publik, sehingga secara tidak langsung dapat mempengaruhi reputasi perusahaan. Dalam penilaian ketaatannya PROPER menggunakan indikator warna sebagai berikut”

**Tabel 2.1 Tingkat PROPER**

Indikator warna	Deskripsi
Emas	Usaha dan/atau kegiatan yang telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan ( <i>enviromental exellency</i> ) dalam proses produksin dan/atau jasa, serta melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat.
Hijau	Usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan ( <i>beyond compliance</i> ) melalui pelaksanaan system penelolahan lingkungan dan mereka telah memanfaatkan sumber daya secara efisien serta melaksanakan tanggung jawab sosial dengan baik.
Biru	Usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Merah	Usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan tetapi belum sesuai dengan persyaratan sebagaimana telah diatur dalam peraturan

Indikator warna	Deskripsi
	perundang-undangan.
Hitam	Usaha dan/atau kegiatan yang dalam melakukan usaha dan/atau kegiatannya telah dengan sengaja melakukan perbuatan atau kelalaian sehingga mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau tidak melaksanakan sanksi administratif.

Sumber: Laporan Program Penilaian Peringkat kerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER), 2019, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Diolah oleh peneliti).

### 8. Tipe industri

Industri adalah suatu bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah dan/atau memanfaatkan sumber daya industri untuk menghasilkan barang yang memiliki nilai tambah lebih tinggi nilai atau manfaat, termasuk jasa industri (UU Perindustrian No. 3, 2014 pasal 1). Jenis industri membagi industri menjadi dua kelompok, yaitu industri padat karbon dan industri non padat karbon.<sup>31</sup> Perusahaan padat karbon seperti energi, transportasi, material, dan utilitas cenderung mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan aspek lingkungan dibandingkan dengan perusahaan yang tidak intensif memproduksi karbon dari operasionalnya kegiatan. GICS (*Global Industry Classification Standard*) mengkategorikan perusahaan yang sebagian besar

---

<sup>31</sup> Putri Citra Pratiwi dan Vita Fitria Sari, “Pengaruh Industri, Media Exposure dan Profitabilitas terhadap Carbon Emission Disclosure”, *Jurnal WRA* 4, no 2 (2018): 833.

mengekspresikan kegiatan lingkungan mereka sebagai perusahaan dari pertambangan, sektor manufaktur dan pertanian.<sup>32</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Bayu Tri Cahya. (2018)	Carbon Emission Disclosure: Ditinjau Dari Media Exposure, Kinerja Lingkungan Dan Karakteristik Perusahaan Go Public Berbasis Syariah Di Indonesia	Metode <i>purposive sampling</i>	Berdasarkan hasil regresi model penelitian dapat disimpulkan bahwa hanya tipe industri (berpegaruh negatif secara signifikan) dan profitabilitas (berpegaruh positif signifikan) terhadap pengungkapan CED, sedangkan kinerja lingkungan, media <i>exposure</i> , dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan CED.
2.	Irwahantoko & Basuki (2018)	<i>Carbon Emission Disclosure</i> Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia Pada	Metode pengukuran	<i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap <i>carbon emission disclosure</i> , sedangkan ukuran perusahaan,

<sup>32</sup> R. Jannah dan D. Muid, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Carbon Emission Disclosure pada Perusahaan di Indonesia (Studi Empiris Pada Perusahaan Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2012)", (*Skripsi*, Universitas Diponegoro Semarang, 2018), 13.

No	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		Tahun 2012-2013.		profitabilitas, kompetisi dan pertumbuhan tidak berpengaruh terhadap <i>carbon emission disclosure</i> .
3.	Amaliyah & Solikhah (2019)	Pengungkapan Emisi Karbon Pada Perusahaan Non Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2013-2017.	Model Regresi	Kepemilikan institusional dan komite audit yang tinggi mampu meningkatkan pengungkapan emisi karbon. Sementara kinerja lingkungan, kepemilikan manajerial, komisaris independent, dewan direksi, umur dewan direksi, dan tingkat pendidikan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.
4.	Saptiwi (2019)	Peranan Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pengungkapan Emisi Karbon Pada Perusahaan	Model regresi	Kinerja lingkungan, ukuran perusahaan dan komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon. Tipe



No	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2012-2016.		industri dan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap pengungkapan emisi karbon. Sedangkan leverage tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon.
5.	Apriliana et al., (2019)	Carbon Emission Disclosure Pada Perusahaan Non-Kuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Periode 2015-2017.	Analisis Regresi Linear Berganda dengan Melakukan Uji Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, Dan Uji Hipotesis.	Tipe industry dan profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap carbon emission disclosure. Sementara, kinerja lingkungan tidak berpengaruh terhadap carbon emission disclosure.
6.	Ulfa & Ermaya (2019)	Carbon Emission Disclosure Pada Perusahaan Non-Kuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016.	Analisis Dekskriptif, Uji Amsusi Klasik, Uji Hipotesis Dan Regresi Linier Berganda.	Media exposure berpengaruh signifikan terhadap carbon emission disclosure. Sementara kinerja lingkungan dan tipe industry tidak memiliki pengaruh yang signifikan

No	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				terhadap carbon emission disclosure.
7.	Trufvisa et al., (2019)	Pengungkapan Emisi Karbon Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017.	Model Regresi Data Panel.	Komposisi komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon. Sedangkan ukuran dewan (trufvisa et al., 2019) komisaris, keragaman gender dan keragaman kebangsaan dalam dewan komisaris tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon.
8.	Setiawan et al., (2019)	Pengungkapan Emisi Karbon Dalam Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017.	Model regresi	Board size berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon, board independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon, keragaman gender tidak

No	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon, sementara board foreign diversity berpengaruh negatif terhadap pengungkapan emisi karbon.
9.	Atang Hermawan et al., (2018)	<i>Going Green: Determinants of Carbon Emission Disclosure in Manufacturing Companies in Indonesia</i>	Metode purposive sampling	Bahwa regulator berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon, profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon, sedangkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.

No	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
10.	Muhammad Wahyuddin Abdullah et al., (2020)	<i>Carbon Emission Disclosure in Indonesian Firms: The Test of Media-exposure Moderating Effects</i>	Uji asumsi klasik	Studi ini memberikan bukti segar tentang isu pengungkapan emisi karbon dengan mempertimbangkan pengaruh ekspos media di Jakarta Islamic Index Bursa Efek Indonesia.
11.	Akhiroh & Kiswanto (2016)	Carbon Emission Disclosure Pada Perusahaan Non Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2014.	Checklist Index Carbon Disclosure Project Yang Dikembangkan Oleh Choi Et Al., (2013).	Profitabilitas, kepemilikan manajerial dan komite audit berpengaruh signifikan terhadap <i>carbon emission disclosure</i> . Sedangkan kinerja lingkungan, <i>financial distress</i> , kepemilikan institusional dan proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap <i>carbon emission disclosure</i> .

Penelitian sebelumnya telah meneliti berbagai faktor yang memengaruhi *carbon emission disclosure* sebagai bagian dari tanggung jawab dan komitmen perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya. Namun,

berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini bermaksud untuk memodifikasi dari beberapa penelitian terdahulu dengan meneliti pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di ISSI periode 2018-2021.

## C. Hipotesis Penelitian

### 1. *Growth dan Carbon Emission Disclosure*

Perusahaan yang sedang bertumbuh akan konservatif dalam menggunakan sumber daya yang mereka miliki, dan akan menggunakan sumber daya yang fokus untuk meningkatkan kinerja dan mengembangkan sektor ekonomi Irwhantoko and Basuki. Long et al menjelaskan bahwa perusahaan yang sedang bertumbuh banyak menggunakan sumber daya alam, termasuk energi yang bersumber dari batu bara dan gas yang berarti bahwa perusahaan yang sedang bertumbuh banyak menghasilkan carbon emission dari kegiatan operasionalnya.<sup>33</sup>

Penelitian oleh Irwhantoko & Basuki dan Dwinanda & Kawedar memberikan hasil growth tidak berpengaruh pada carbon emission disclosure. Namun penelitian Luoetal menyatakan bahwa ada dampak negatif signifikan dari growth dengan carbon emission disclosure.<sup>34</sup>

H<sub>1</sub>: *Growth* memiliki dampak positif terhadap *carbon emission disclosure*.

### 2. *Profitability dan Carbon Emission Disclosure*

Perusahaan dengan kondisi keuangan yang baik lebih mungkin mengungkapkan informasi lingkungan. Menurut Choi et al, perusahaan dengan kondisi keuangan yang baik mampu membayar sumber daya tambahan manusia atau keuangan yang dibutuhkan untuk pelaporan

---

<sup>33</sup> I. Irwhantoko dan B. Basuki, "Carbon Emission Disclosure: Studi pada Perusahaan Manufaktur Indonesia", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 18, no. 2 (2016), 96.

<sup>34</sup> Irwhantoko dan Basuki, 97.

sukarela dan pengungkapan emisi karbon yang lebih baik untuk menahan tekanan eksternal.<sup>35</sup>

Studi oleh Kalu et al menyarankan bahwa keuntungan memberi perusahaan kumpulan sumber daya untuk kegiatan mitigasi dan pelaporan lingkungan. Selain itu, pengungkapan karbon bertindak sebagai sarana untuk mencapai kepercayaan dan legitimasi publik dan legitimasi dalam hal bagaimana keuntungan dibuat, bukan pada biaya lingkungan. Bukti empiris tentang bagaimana pengungkapan gas rumah kaca mempengaruhi profitabilitas beragam.<sup>36</sup>

H<sub>2</sub>: *Profitability* memiliki dampak positif terhadap *carbon emission disclosure*.

### 3. *Enviromental Performance dan Carbon Emission Disclosure*

Dawkins dan Fraas juga menunjukkan kinerja lingkungan mempunyai hubungan positif dengan Pengungkapan lingkungan yaitu perubahan iklim. Hasil Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Clarkson et al menunjukkan bahwa kinerja lingkungan berasosiasi positif dengan tingkat pengungkapan lingkungan diskresioner dan perusahaan dengan kinerja lingkungan yang unggul memiliki strategi lingkungan yang proaktif.<sup>37</sup>

Hal ini sejalan dengan penelitian Verrechia dalam Matsumura et al yang menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih proaktif lingkungan (misalnya, melalui inisiatif seperti pelaksanaan program pencegahan polusi yang kuat dan menggunakan energi terbarukan, dan lain-lain) memiliki insentif untuk secara sukarela mengungkapkan

---

<sup>35</sup> Bo Bae Choi, dkk, "An Analysis of Australian Company Carbon Emission Disclosures", 80.

<sup>36</sup> J.U. Kalu, dkk, "A Review of Economic Factors Influencing Voluntary Carbon Disclosure in The Property Sector of Developing Economies", *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (2016): 30.

<sup>37</sup> Peter M. Clarkson, dkk, "Revisiting TheRelation Between Environmental Performance and Environmental Disclosure: AnEmpirical Analysis", *Accounting, Organizations and Society* 33, no. 4-5 (2008): 305.

informasi lingkungan, seperti informasi tingkat emisi karbon dalam rangka mengungkapkan tipe kinerja mereka yang tidak secara langsung diamati oleh investor dan pemangku kepentingan eksternal lainnya.<sup>38</sup>

H<sub>3</sub>: *Environmental performance* memiliki dampak positif terhadap *carbon emission disclosure*.

#### 4. Tipe Industri dan *Carbon Emission Disclosure*

Tidak semua perusahaan yang bergerak di berbagai bidang mengungkapkan aktivitasnya apabila tidak mempunyai nilai yang positif bagi perusahaan tersebut. Untuk jenis perusahaan *high profile* seperti pertambangan, manufaktur yang menghasilkan kerusakan lingkungan dan emisi karbon tinggi lebih parah dibandingkan dengan jenis perusahaan *low profile* seperti yang bergerak di bidang jasa, perdagangan, dan lain sebagainya. Perusahaan *high profile* seperti pertambangan, dan manufaktur menghasilkan kerusakan lingkungan dan emisi karbon tinggi lebih parah dibandingkan dengan jenis perusahaan *low profile* seperti yang bergerak di bidang jasa, perdagangan, dan lain sebagainya.<sup>39</sup> Menurut Wang et al Perusahaan *high profile* yang aktivitas operasionalnya berdampak negatif terhadap lingkungan cenderung untuk mengungkapkan lebih banyak tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) informasi dibandingkan *low profile*.<sup>40</sup> Hasil penelitian Choi et al menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan emisi karbon sukarela akan lebih besar di perusahaan pada industri yang

---

<sup>38</sup> Y. Matsumura, dkk, "Revision of the Lema (Lema) concinnipennis Baly, 1865 species group (Coleoptera: Chrysomelidae: Criocerinae) in Japan". *Journal of Natural History* 45, no. 2 (2011): 25.

<sup>39</sup> Richatul Jannah dan Dul Muid, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Carbon emission disclosure pada Perusahaan di Indonesia (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2012)", *Diponegoro Journal of Accounting* 3, no. 2 (2014): 2339.

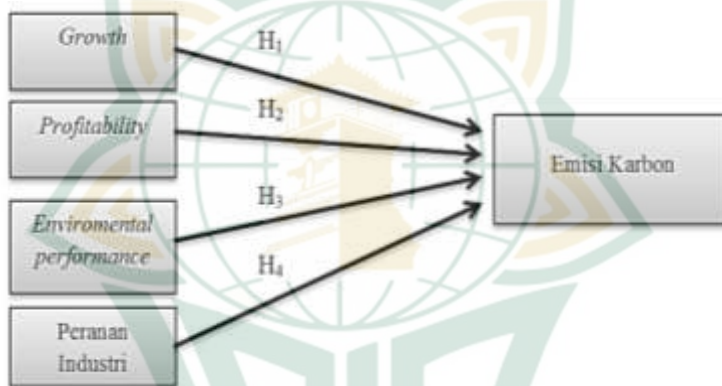
<sup>40</sup> Jianling Wang, dkk, "The Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure: Evidence From China", *The Journal of Applied Business Research* 29 no. 6 (2013): 7.

intensif dalam menghasilkan emisi seperti energi, transportasi, materials dan utilitas.<sup>41</sup>

H<sub>4</sub>: Tipe industri memiliki dampak positif terhadap *carbon emission disclosure*.

#### D. Kerangka Berpikir

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, kerangka pemikiran dalam penelitian ini menunjukkan arah hubungan yang positif, untuk lebih jelasnya dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Berpikir**

<sup>41</sup> Bo Bae Choi, dkk, "An Analysis of Australian Company Carbon Emission Disclosures", 61.